



# RENCANA KERJA

**KECAMATAN TELLU SIATTINGE  
KABUPATEN BONE**

**TAHUN**

**2023**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
PENUTUP**

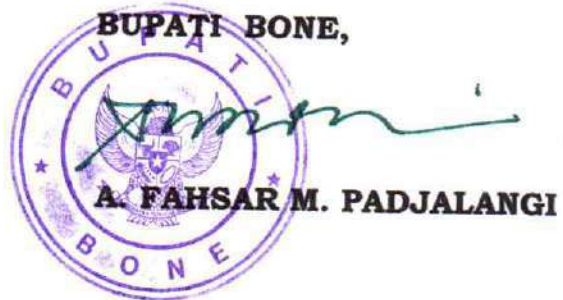
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**BUPATI BONE,**



Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39**

Lampiran XLVII

Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2022

Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2023

RENCANA KERJA

KECAMATAN TELLU SIATTINGE

TAHUN 2023

**RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN TELLU SIATTINGE**  
**KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2022 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Tokaseng, 25 Juli 2023

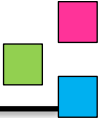
CAMAT TELLU SIATTINGE



**A. KUSAYYENG, S.Sos, M.Si**

Pangkat : PEMBINA

NIP : 19661231 198602 1 020



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II    HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah .....	26
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat .....	34
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .. ..	37
3.3. Program dan Kegiatan .....	38
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V    PENUTUP .....	51

## LAMPIRAN

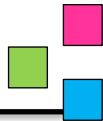
1. Cascading Kinerja Renja Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2023
2. Rumusan Program, Kegiatan & Pendanaan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Cetakan SIPD) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone





# DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
<b>Gambar 1</b> Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	2
<b>Gambar 2</b> Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .....	4
<b>Tabel 2.1</b> Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2020 .....	14
<b>Tabel 2.2</b> Capaian Kinerja Program .....	21
<b>Tabel 2.3</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone .....	25
<b>Tabel 2.4</b> Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone .....	29
<b>Tabel 3</b> Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.....	39
<b>Tabel 4</b> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone .....	42



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

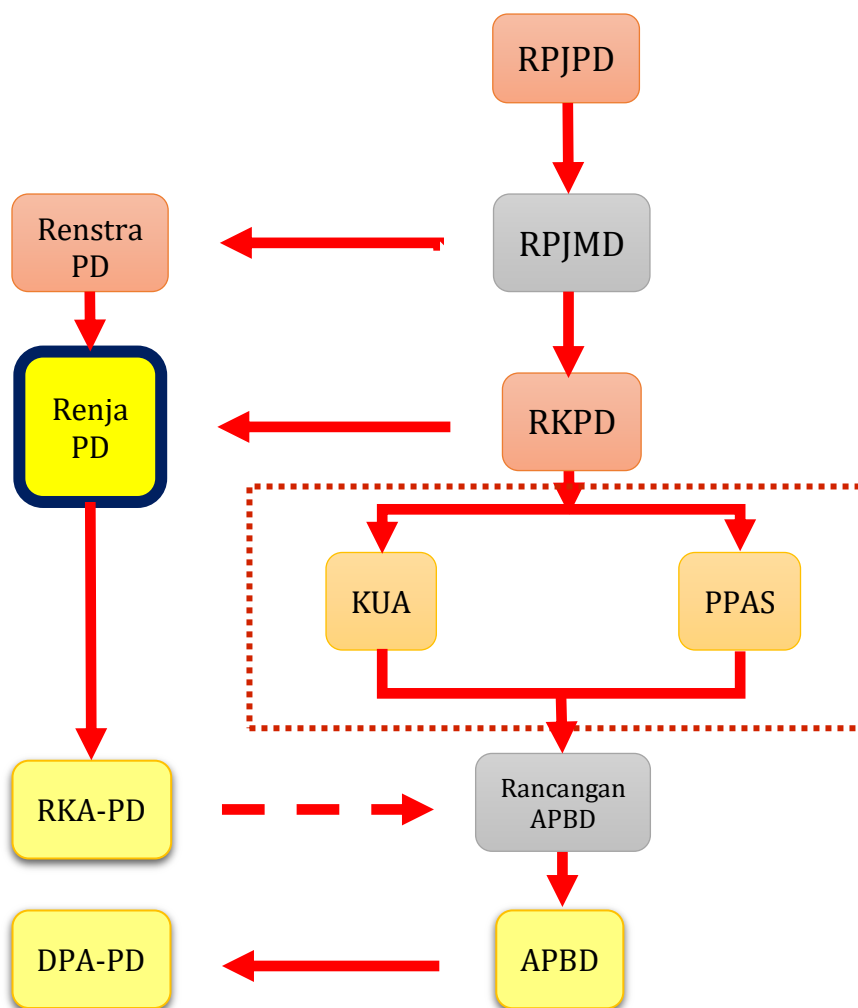
Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan



berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

**Gambar. 1**  
**Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan**  
**Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**



Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik*,



*partisipatif, politis, top-down dan bottom up, dengan substansi pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial).*

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

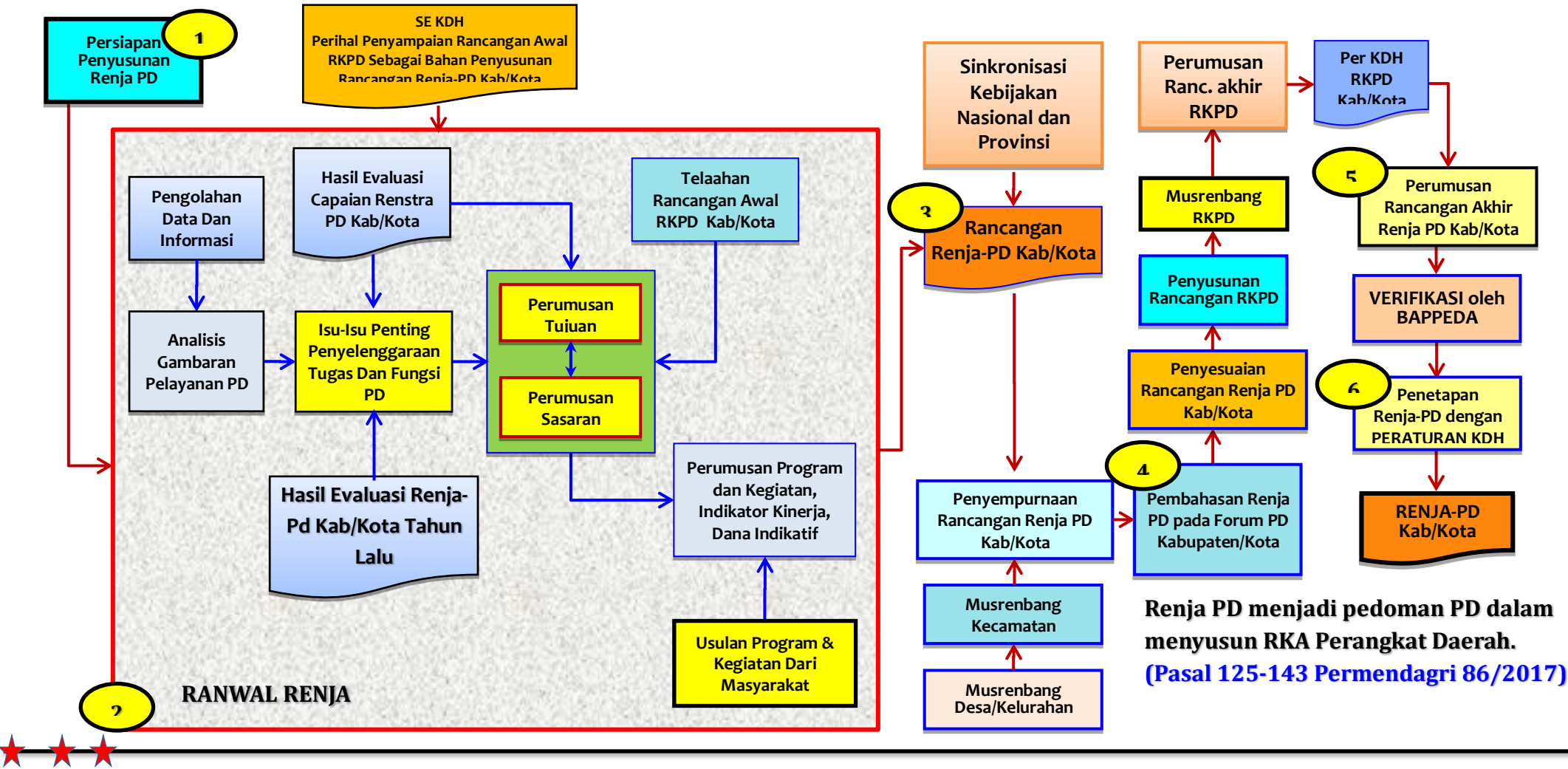
Setelah melalui proses verifikasi oleh Bappeda dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

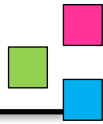
Adapun Alur penyusunan renja perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

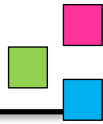
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);





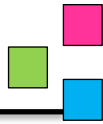
9. Undang-undang Nomo1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nonor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas





- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);





26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan





- Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
  40. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
  41. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);





42. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108;
43. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

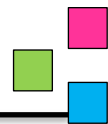
1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge dalam melaksanakan urusan kewilayahan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Tellu Siattinge pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2023 ini sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tellu Siattinge pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.







Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2023 ini nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renjana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan;** Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu;** Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan;** Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;** Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab V Penutup;** Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.







## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

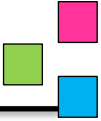
Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Tahun 2021 merupakan tahun *Ketiga* dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge (Renstra 2018-2023), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Tellu Siattinge sebesar **Rp. 12.885.092.704 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah)** yang terdiri atas belanja Operasi sebesar **Rp. 11.758.156.242,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** dan belanja Modal sebesar **Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**. Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar **RP. 12.596.946.817,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)** atau mencapai 99 % terdiri dari 5 program dengan 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

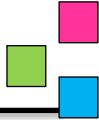
Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tellu Siattinge tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tellu Siattinge. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tellu Siattinge tahun berjalan





(tahun 2022). Adapun gambaran selengkapnya, disajikan dalam table berikut ini :

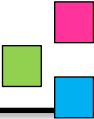




Tabel 2.1 (T-C.29.)  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TAHUN 2021 DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022

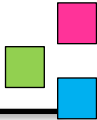
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7					URUSAN KEWILAYAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	9	2	3	3	100%	2	7	78%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	3	1	1	1	100%	1	3	100%





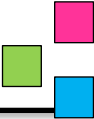
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2	-	-	-	0%	1	1	50%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	3	-	1	1	100%	1	2	67%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	3	-	1	1	100%	1	2	67%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel)	85	-	25	25	100%	10	35	41%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





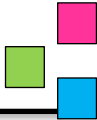
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	9	3	3	3	100%	3	9	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan)	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan)	844	120	264	264	100%	264	648	77%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





7	01	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)	9	3	3	3	100%	2	8	89%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	22	3	5	5	100%	4	12	55%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpo/Wifi dan Air (rekening)	108	36	36	36	100%	36	108	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	588	156	144	144	100%	156	456	78%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit)	15	5	5	5	100%	4	14	93%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	36	12	12	12	100%	12	36	100%





7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	12	4	4	4	100%	4	12	100%

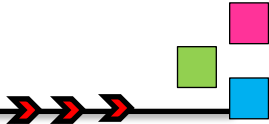


7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	108	36	36	36	100%	36	108	100%
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.02		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan)	45	15	15	15	100%	15	45	100%

Sumber Data :Laporan Kinerja dan Laporan keuangan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2020 dan 2021 serta Renstra-P 2018-2023







Realisasi Keuangan Tahun 2020 - Tahun 2022 (Triwulan I) Kec. Tellu Siattinge

JENIS BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022 (Triwulan I)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	11,811,210,406	11,270,121,465	95%	11,757,054,704	11,471,616,717	98%	11,580,226,736	2,331,050,421	20%
Belanja Barang dan Jasa	1,366,161,000	1,365,911,800	100%	1,101,538,000	1098830100	100%	787,532,300	164,424,120	21%
Belanja Modal	62,000,000	62,000,000	100%	26,500,000	26,500,000	100%	140,505,700	0	0%
Jumlah	13,239,371,406	12,698,033,265	98%	12,885,092,704	12,596,946,817	99%	12,508,264,736	2,495,474,541	14%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kec. Tellu Siattinge Tahun 2020-2022 (Triwulan I Tahun Berjalan)

Sebagai penjelasan terkait table diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 yang dimulai dari tahun 2020 sebagai base line data evaluasi capaian kinerja tiga tahun selanjutnya. Baseline data yang bisa disajikan hanya terkait dengan indikator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indikator kinerja dimana akumulasinya tetap memperhitungkan data capaian indikator program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Secara pencapaian kinerja Kecamatan Tellu Siattinge bisa dikatakan berjalan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan, begitu juga target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra Kecamatan Tellu Siattinge sudah terlaksana dengan baik pula. Pencapaian anggaran yang ada pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dari 98 % menjadi 99 % dan bisa dikatakan berhasil meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2021 akibat pandemi covid 19. Sementara untuk pencapaian anggaran Tahun 2022 (tahun berjalan sampai triwulan I) baru mencapai 14 % dari total anggaran yang telah disiapkan.



Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Perubahan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja di tahun sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berupa gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge yaitu :

1. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Tellu Siattinge tidak ada Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2021.

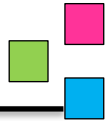
2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Semua program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 rata-rata telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), meskipun terjadi refofusing anggaran pada tahun 2021, seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Program

No	Program	Kinerja Program/Kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	98%	98%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021



### **3. Realisasi yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %

### **4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan**

Factor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai harapan.

### **5. Implikasi terhadap Target Renstra Perubahan**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-P tahun 2018 – 2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) disebabkan karena adanya Perubahan perundang-undangan terkait indikator program/kegiatan dan sub kegiatan. Namun adanya capaian program Renstra-P PD maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan sehingga tata kelola pemerintahan bisa tercapai dengan baik.

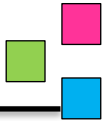
### **6. Kebijakan perencanaan & penganggaran kedepannya untuk pencapaian target kinerja**

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staff yang menangani perencanaan dan penganggaran maupun para pejabat eselon sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge merupakan suatu pengkajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak dan hasil atas pelayanan kinerja serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program kegiatan dan sub Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk mencapai semua itu diperlukan Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat





pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge sebagai penunjang daerah dibidang pemerintahan, oleh karena itu, tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

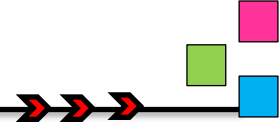
Penentuan tolok ukur kinerja serta indikator kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja diperlukan data-data yang yang dapat merepresentasikan nilai dari dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Kajian terhadap indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge yang telah tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023..

Berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge yang dijabarkan kedalam tabel berikut:



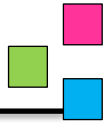


Tabel 2.3 (T-C.30)  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELLU SIATTINGE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP			BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	A (81,01)	Data Hasil Evaluasi Sakip OPD masih berproses	A (80-90)	A (80-90)	Hasil evaluasi APIP terhadap Implementasi Sakip Kecamatan Tellu Siattinge dengan tingkat akuntabilitas kinerja telah mencapai predikat A (nilai 81.01) pada tahun 2021. dalam arti sudah mencapai bahkan melampui target pencapaian kinerja akhir yang ditetapkan dalam Renstra-P Tellu Siattinge Tahun 2018-2023. Namun kedepannya tetap ditingkatkan agar menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			98	99	100	100	97.63	Data Pelayanan kepada masyarakat masih berproses	100	100	Pencapaian indikator Peayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan di tahun 2021 mengalami penurunan dari target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018-2023 sebanyak 0.37 % dari 98 % menjadi 97,63 % .Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, sehingga masyarakat tidak secara maksimal mendapatka layanan seperti yang diharapkan meski pelayanan tetap berjalan namun secara online.

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023, Laporan Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021





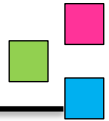
### 2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan ditingkat Kecamatan dengan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi adalah Kecamatan Tellu Siattinge sebagai berikut:

- ❖ Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal dari segi kualitas dan kuantitas dalam menguasai bidang tugas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai tugas dan fungsinya yang didukung dengan anggaran yang memadai;
- ❖ Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi produktivitas aparatur;
- ❖ Pengelolaan arsip di Kecamatan Tellu Siattinge belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Diperlukan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen kecamatan;
- ❖ Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- ❖ Pengembangan potensi desa/kelurahan baik SDA maupun SDM melalui pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kegiatan masyarakat masih rendah.
- ❖ Kerjasama masyarakat dalam pertanggungjawaban administrasi terhadap bantuan stimulant pembangunan yang masih kurang
- ❖ Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik sehingga diperlukan pembinaan secara khusus guna





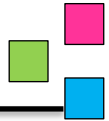
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

- ❖ Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
- ❖ Desa masih kesulitan dalam penyusunan pelaksanaan maupun evaluasi APBDes. Sehingga masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Di karenakan masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
- Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur
- Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge sekiranya akan memberikan kontribusi yang cukup positif dalam pencapaian visi misi Kabupaten Bone dalam





menciptakan dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Good Government).

Selanjutnya perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan dan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur kecamatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

2. Peluang

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

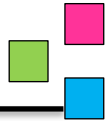
## **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Tellu Siattinge untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemeberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus ampu mengimplementasikan tugas dan





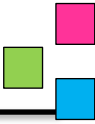


fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Kecamatan Tellu Siattinge merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone. Pembangunan Kabupaten Bone dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi social ekonomi politik di Kecamatan Tellu Siattinge akan menjadi hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Bone.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Tellu Siattinge membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Untuk melihat Kecamatan Tellu Siattinge secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, berikut telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2023 dalam table berikut ini :

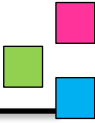




Tabel 2.4 (T-C.31)  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
KECAMATAN TELLU SIATTINGE

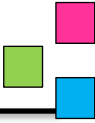
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	36,382,250,000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	12,447,553,846	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	163,125,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	27,212,500	Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	3 dokumen	80,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	9,855,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1 dokumen	16,875,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	1,005,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	11,250,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	1,010,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1 dokumen	11,250,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	9,450,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	31,875,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1 Laporan	4,817,500	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588





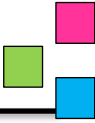
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	11,875,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	1,075,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan PD	100%	35,000,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan PD	100%	11,927,875,736	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan bagi pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	1 Tahun	35,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	148 orang/bulan	11,927,875,736	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi PD	100%	14,625,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi PD	100%	6,000,000	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Kepegawaian bagi pegawai kantor Camat Tellu Siattinge
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel)	12 stel	14,625,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	12 Paket	6,000,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum PD	100%	463,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum PD	100%	209,175,070	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Umum Penunjang aktivitas organisasi
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	3 kegiatan	90,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36 Paket	40,183,180	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan)	3 kegiatan	250,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36 Paket	116,141,890	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	3 kegiatan	27,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	36 Paket	9,440,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12 kali	14,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	3,600,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588





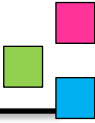
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan)	300 kegiatan	82,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300 Laporan	39,810,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	170,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47,610,200	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan BMD yang bersifat prioritas
14	Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)	3 unit	85,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3 unit	3,648,420	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	6 unit	85,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6 unit	43,961,780	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	100%	231,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	100%	149,168,784	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran administrasi perkantoran
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rekening Listrik, Telpn/Wifi dan Air (rekening)	36 rekening	41,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	10,855,584	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
17	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	80 orang	190,000,000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	138,313,200	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	340,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80,511,556	Merupakan Pelayanan Kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit)	4 unit	270,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4 unit	50,167,456	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588





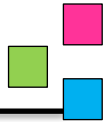
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12 kegiatan	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	30,344,100	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	63,000,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	16,854,220	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100%	63,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100%	16,854,220	Merupakan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	1 kegiatan	63,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	16,854,220	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	6,139,500,000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	309,155,670	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	112,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	15,000,520	Merupakan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	2 dokumen	112,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	15,000,520	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	6,027,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	294,155,150	Merupakan Kegaitan Pemberdayaan di Kelurahan
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	2 paket	5,880,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit	270,000,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Keppmendagri 050 588





23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	4 dokumen	147,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	2 Pokmas	24,155,150	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	220,000,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	54,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	220,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	54,000,000	Merupakan Kegiatan dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36 kali	220,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	54,000,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100%	70,000,000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Tellu Siattinge	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100%	28,350,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	70,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tellu Siattinge	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	28,350,000	Merupakan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
25	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan)	15 laporan	70,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	15 laporan	28,350,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588





Pada table diatas diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Tellu Siattinge pada RKPD Tahun 2022 dan analisis kebutuhan tahun 2023.pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge dengan Pagu rancangan RKPD sebesar **Rp.36.380.250.000** sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi **Rp. 12.447.553.846** Pada prinsipnya acuan pagu Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan sasaran dan target capaian yang ditetapkan oleh BKAD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hali ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Tellu Siattinge didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

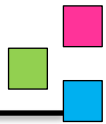
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu *"Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*, dengan focus pembangunan diarahkan pada *Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : *"Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter"*, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :







1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

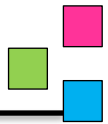
Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;





5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

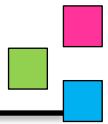
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan**

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih tentang visi dan misi serta program strategis yang akan dilakukan selama masa pemerintahan lima (5) tahun kedepan yang tertuang dalam





RPJMD Perubahan kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Tellu Siattinge.

**Visi** Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 :

**Masyarakat Bone yang Mandiri,  
Berdaya Saing dan Sejahtera**

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yakni :

**Transformasi Pemulihan Ekonomi  
melalui Penguatan Infrastruktur Dasar  
dan Sosial Masyarakat**

Sedangkan **Misi** pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge adalah :

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan  
yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi  
dan Nepotisme (KKN)**

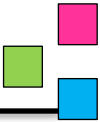
Adapun Rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

**Tujuan** : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge*

**Sasaran** : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada Tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada table berikut ini :





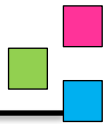
3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka pendek pada Tahun 2023 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023  
Kecamatan Tellu Siattinge

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		PROGRAM KEGIATAN
			TARGET RENJA 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP  2.Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan	A (80-90)	A (80-90)	<p>☛ <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD</li><li>◆ Administrasi Keuangan PD</li><li>◆ Administrasi Kepegawaian PD</li><li>◆ Administrasi Umum PD</li><li>◆ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>◆ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>◆ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ul> <p><i>Terdiri dari 19 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>
			100 %	100 %	<p>☛ <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait</li></ul> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>
			100 %	100 %	<p>☛ <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li><li>◆ 'Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</li></ul> <p><i>Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>
			100 %	100 %	<p>☛ <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman &amp; Ketertiban Umum</li></ul> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>
			100 %	100 %	<p>☛ <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 'Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li></ul> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>



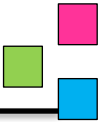


Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan menengah berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja Tahun 2023, pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum oleh kecamatan juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2023, direncanakan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN**

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program, kegiatan yang merupakan outcome, output dan input masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input yang merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge.

Setelah melalui perhitungan riil anggaran, yang disesuaikan dengan target kinerja (outcome/output) yang akan dicapai pada Tahun 2023, maka rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel. 4 (T-C.33) : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kecamatan Tellu Siattinge

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahunan 2023				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahunan 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7					UNSUR KEWILAYAAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	12,447,553,846	DAU - APBD		100%	14,979,304,615
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	27,212,500	DAU - APBD	Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	34,815,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kec. Tellu Siattinge	3 Dokumen	9,855,000	DAU - APBD	Meliputi Dokumen Renja, Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	11,826,000



7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	1 Dokumen	1,005,000	DAU - APBD	Waktu Penyusunan Sesuai Dengan Tahapan Penganggaran	1 Dokumen	1,206,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	1 Dokumen	1,010,000	DAU - APBD	Waktu Penyusunan Sesuai Dengan Tahapan Penganggaran	1 Dokumen	1,212,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	1 Dokumen	9,450,000	DAU - APBD	Waktu Penyusunan Sesuai Dengan Tahapan Penganggaran	1 Dokumen	13,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tellu Siattinge	1 Laporan	4,817,500	DAU - APBD	Meliputi Laporan Hasil Kinerja LKJIP	1 Laporan	5,781,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	1 Laporan	1,075,000	DAU - APBD	Meliputi Laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Laporan	1,290,000





7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	11,927,875,736	DAU - APBD	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan Bagi Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD	100%	14,313,450,883
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Siattinge	148 orang/bulan	11,927,875,736	DAU - APBD	Akumulasi dari seluruh pembayaran bulanan atas Hak ASN yang meliputi gaji, tunjangan, TPP, dan luran asuransi	148 orang/bulan	14,313,450,883
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	6,000,000	DAU - APBD	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai kantor Camat Tellu Siattinge	100%	7,200,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tellu Siattinge	12 Paket	6,000,000	DAU - APBD	Berupa pakaian seragam batik kantor Camat Tellu Siattinge	12 Paket	7,200,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan ADministrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	209,175,070	DAU - APBD	Merupakan pelayanan rutin Administrasi Umum Penunjang Aktivitas Organisasi	100%	291,090,084



7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	36 Paket	40,183,180	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	36 Paket	48,129,816
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	36 Paket	116,141,890	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	36 Paket	139,370,268
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	36 Paket	9,440,000	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	36 Paket	11,328,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	12 Dokumen	3,600,000	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Dokumen	4,320,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Siattinge	300 Laporan	39,810,000	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	300 Laporan	87,852,000



7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	47,410,200	DAU - APBD	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan BMD yang bersifat prioritas	100%	57,132,240
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	1 unit	3,648,420	DAU - APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	1 unit	4,378,104
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	8 unit	43,961,780	DAU - APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan /perlengkapan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi dan operasional	8 unit	52,754,136
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Tellu Siattinge	100%	149,168,784	DAU - APBD	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran administrasi perkantoran	100%	179,002,541
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	36 Laporan	10,855,584	DAU - APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	36 Laporan	13,026,701
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Tellu Siattinge	36 Laporan	138,313,200	DAU - APBD	Meliputi jasa tenaga administrasi dan tenaga kebersihan	36 Laporan	165,975,840



7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Siattinge	100%	340,000,000	DAU - APBD	Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan	100%	80,511,556
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tellu Siattinge	4 Unit	50,167,456	DAU - APBD	Dianggarkan sebagai biaya persediaan pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas	4 Unit	60,200,947
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Tellu Siattinge	2 Unit	30,344,100	DAU - APBD	Dianggarkan sebagai biaya persediaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor	2 Unit	36,412,920
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Peningkatan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tellu Siattinge	100%	16,854,220	DAU - APBD		100%	20,225,064
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Kec. Tellu Siattinge	100%	16,854,220	DAU - APBD	Merupakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	20,225,064



7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tellu Siattinge	1 laporan	16,854,220	DAU - APBD	Merupakan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dengan PD dan Instansi terkait yaitu musrembang Kecamatan	1 laporan	20,225,064
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>309,155,670</b>	<b>DAU - APBD</b>		<b>100%</b>	<b>370,986,804</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,520</b>	<b>DAU - APBD</b>	<b>Merupakan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>18,000,624</b>
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	2 laporan	15,000,520	DAU - APBD	Merupakan Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat persemester dalam 1 Tahun	2 laporan	18,000,624
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>294,155,150</b>	<b>DAU - APBD</b>	<b>Merupakan kegiatan pemberdayaan di kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>352,986,180</b>
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Tellu Siattinge	2 Unit	270,000,000	DAU - APBD	Jumlah Sarana Yang Terbangun Di Kelurahan	2 Unit	324,000,000



7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	2 Pokmas	24,155,150	DAU - APBD	Meliputi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yaitu Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	2 Pokmas	28,986,180
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>54,000,000</b>	<b>DAU - APBD</b>		<b>100%</b>	<b>242,000,000</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dilaksanakan</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>54,000,000</b>	<b>DAU - APBD</b>	<b>Merupakan Kegiatan Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>242,000,000</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	12 Laporan	54,000,000	DAU - APBD	Koordinasi Dan Monitoring Bersama Tripikal Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12 Laporan	242,000,000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	<b>Kec. Tellu Siattinge</b>	<b>100%</b>	<b>28,350,000</b>	<b>DAU - APBD</b>		<b>100%</b>	<b>34,020,000</b>



7	01	06	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Kec. Tellu Siattinge	100%	28,350,000	DAU - APBD	Merupakan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	34,020,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tellu Siattinge	15 Laporan	28,350,000	PAD - APBD	Assistensi/Pendampingan terkait Dana Desa	15 Laporan	34,020,000
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA OPERASIONAL (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG & JASA)									12.808.303.536				15.589.404243
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA MODAL (BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN)									47.610.200				57.132.240
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KEC.TELLU SIATTINGE									12.855.913.736				15.646.536.483

Sumber Data :

Dalam Tabel 4 tersebut diatas, disajikan hal-hal yang menjadi penting sebagai penjelasan atas program kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat Program/Kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2023 yang penyusunannya dilakukan secara simultan, dengan memperhatikan :

- Keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang ingin dicapai dengan dokumen perencanaan Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023;
- Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output berorientasi pada hasil dan harus memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) demi terciptanya akuntabilitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oleh kementerian. Hasil Penginputan melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan hasil yang efektif, efisien dan ekonomis maka Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang isinya menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2023 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Seluruh kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah kecamatan Tellu Siattinge lainnya akan





melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah kecamatan Tellu Siattinge perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dimasa yang akan datang guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah Tahun 2023, yaitu ***“Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat”*** sehingga tercipta ***“Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing”***.

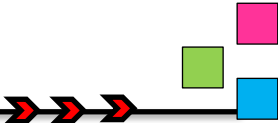
Tokaseng, 25 Juli 2023  
CAMAT  
  
**A. KESAYYENG, S.Sos, M.Si**  
Pangkat : PEMBINA IV A  
NIP. : 19661231 198602 1 020



LAMPIRAN 1

CASCADING KINERJA KECAMATAN TELLU SIATTINGE  
TAHUN 2023





CASCADING KECAMATAN TELLU SIATTINGE

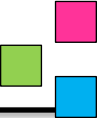
VISI RPJMD KAB.BONE 2018- 2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)
MISI RPJMD KAB.BONE 2018- 2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
TUJUAN & SASARAN RPJMD KAB. BONE 2018- 2023	Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN  Berkurangnya Kasus KKN
TUJUAN KECAMATAN	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge
INDIKATOR TUJUAN	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP  Target : A
SASARAN KECAMATAN	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR SASARAN	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan  Target : 100 %



PENANGGUNG JAWAB SASARAN	KECAMATAN TELLU SIATTINGE												
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum	Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		
SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah							Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa		
	Target Kinerja : 100 %							Target Kinerja : 100 %	Target Kinerja : 100 %	Target Kinerja : 100 %	Target Kinerja : 100 %		
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS							SEKRETARIS	SEKRETARIS	SEKRETARIS	SEKRETARIS		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja PD	Administrasi Keuangan PD	Administrasi Kepegawaian PD	Administrasi Umum PD	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

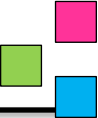
SASARAN KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Tersedianya Bahan Administrasi PD	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan PD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi PD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum PD	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	SEKRETARIS											
KEGIATAN I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Administrasi Keuangan PD	Administrasi Kepegawaian PD	Administrasi Umum PD	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji & Tunjangan Asn	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD & Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

SASARAN SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, beserta Tambahan Penghasilan bulanan bagi ASN	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Mebel sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD & Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara & Dibayarkan Pajak & Perizinannya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD & Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana & Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Gaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah			Terlaksananya Bahan Logistik Kantor sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Peralatan & Mesin Lainnya	Terealisasinya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara & Dibayarkan Pajak & Perizinannya			Jumlah Pokmas & Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
SUB KEGIATAN 3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								



SASARAN SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 4	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
SASARAN SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
SUB KEGIATAN 5	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

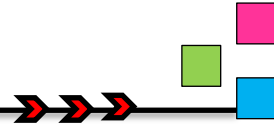




INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
SUB KEGIATAN 6	Evaluasi Kinerja PD	
SASARAN SUB KEGIATAN 6	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja PD	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	







## **LAMPIRAN 2**

### **RUMUSAN PROGRAM & KEGIATAN**

#### **PENDANAAN KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2023 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Cetakan SIPD)**



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN														12,855,913,736				15,646,536,483
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														12,447,553,846				14,979,304,615
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														27,212,500				34,815,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	9,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	11,826,000					
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,206,000					
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,212,000					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	9,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	13,500,000					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	4,817,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,781,000					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,290,000					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														11,927,875,736				14,313,450,883
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	148 Orang/Bulan	100 Persen	11,927,875,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,313,450,883					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														6,000,000				7,200,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Ketersediaan bahan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	7,200,000					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														209,175,070				291,090,084

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Paket	100 Persen	40,183,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	48,219,816
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Paket	100 Persen	116,141,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	139,370,268
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Paket	100 Persen	9,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	11,328,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,320,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	300 Laporan	100 Persen	39,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	87,852,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47,610,200				57,132,240	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	3,648,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,378,104
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	100 Persen	43,961,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	52,754,136
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								149,168,784				179,002,541	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	10,855,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	13,026,701
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	138,313,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,975,840
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80,511,556				96,613,867	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	50,167,456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	60,200,947
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	30,344,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	36,412,920
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,854,220				20,225,064	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								16,854,220				20,225,064	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	16,854,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	20,225,064
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								309,155,670				370,986,804	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,520				18,000,624	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	15,000,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	18,000,624
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								294,155,150				352,986,180	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	324,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	100 Persen	24,155,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	28,986,180
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								54,000,000				242,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								54,000,000				242,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	242,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								28,350,000				34,020,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								28,350,000				34,020,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tellu Siattinge																			
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Laporan	100 Persen	28,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	100 Persen	34,020,000	
TOTAL										12,855,913,736		15,646,536,483							